

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005)
- _____, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, (Malang, Setara Press, 2013)
- Afan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2006)
- _____, Syaukani, Ryaas Rashid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
- Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)
- Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001)
- Ahmad Nadir, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, (Jakarta: Averroes Press, 2005),
- Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Cet-I, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000)
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang, UNPAM PRESS, 2018)
- David Beetham dan Kevin Boyle, *Demokrasi 80 Tanya-Jawab*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000)
- Daniel Solosa, *Pilkada Langsung*, (Jakarta, Media Pressindo, 2005)
- Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016)
- George Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
- Hendarmin Ranadireksa, *Amandemen UUD 1945, Menuju Konstitusi Yang Berkedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2002),

- I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional. Constitutional Complaint. Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- I Dewa Gede Atmaja, *et.al*, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2015)
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. (Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan MK, 2008)
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi), 2006
- _____, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
- Johan Jasin, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Deepublish, 2016),
_____, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007)
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2005)
- _____, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010)
- Joko J. Prihantoro, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan-I, 2005),
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- _____, *Pilkada Serentak, Hubungan Pusat & daerah dan Kebijakan Penanganan Covid 19*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2020)
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Prima Grafika, 2013)
- _____, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000)
- Moh.Mahfud, MD. *Pergulatan Politik dan Hukum*. (Yogyakarta: Gama Media, 1999)
- Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Cetakan ke-2 (Malang: Bayu Media Publishing, 2005)

- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992)
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2013)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, cetakan ke 1, (Surabaya; PT. Bina Ilmu, 1987)
- Puslit IAIN, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000),
- P. Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)
- Rahadi Budi Prayitno dan Arlis Prayugo, *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2023)
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Cetakan-XII, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2016)
- Ridwan Syaidi Tarigan, *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan*, (Purwokerto: Historie Media, 2024)
- Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005),
- Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013)
- Syamsuddin Haris, *Dinamika Politik Pilkada Serentak*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, Cet.1, 2017)
- Trubus Rahardiansah P, *Pengantar Ilmu Politik, Paradigma, Konsep Dasar, dan Relevansinya untuk Ilmu Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2008)

- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2015),
- Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024)
- Yudi Widagdo Harimurti, *Negara Hukum dan Demokrasi: Konsep dan Perkembangan Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2021)

JURNAL

- Abdullah, 2024, “Calon Tunggal dalam Politik Kotak Kosong dan Kekuasaan Pilkada” *Jurnal Kolaborasi Sains*, 7(8)
- Abd Hannad, 2023, “Tingginya Angka Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah dan Melemahnya Demokrasi di Indonesia Kontemporer” *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 5(1)
- Agus Dedi, “implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Moderat*, 7(1)
- Agus Riyanto, 2021, “Fenomena Pasangan Calon Tunggal Pada Pilkada Serentak Di Jawa Tengah”, *Spektrum*, 18(2)
- Anasrullah, *et.al.* 2017, “Analisis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) No. 100/PUU/XIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal Pilkada Serentak di Indonesia”, *Civicus*, 5(1)
- Ahmad Gelora Mahardika, 2018, “Fenomena Kotak Kosong Dalam Pemilukada Serta Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 1(1)
- Ardan Ardian Syah, 2022, “Kebijakan Pemilihan Umum Pasangan Calon Tunggal Presiden dan Wakil Presiden”, *Journal of Governance and Administrative Reform*, 3(2)
- Dedi Mulyadi, *et.al.* 2024, “Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada Tahun 2024”. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(2)

- Diana Dwi Aprilianti, *et. al.* 2024, “Analisa Yuridis Terhadap Aturan Hukum Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Kepastian Hukum”
Yutija, Jurnal Ilmu Hukum, 6(1)
- Emy Hajar Abra, 2021, “Problematika Norma Landasan Partai Politik Indonesia,”
Jurnal Selat, 8(2)
- Erniyati, 2018, “Kajian Kritis Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(2)
- Fikri Gali Fernando Holqi, *et al.* 2025, “Fenomena Calon tunggal dan Arah Gerak Partai Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota 2024”, *Jurnal Pemerintah dan Politik*, 10(1)
- Fitriyah, F., 2020, “Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)”. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1)
- Grace Puwo Nugroho dan Roby Cahyadi Kurniawan, 2025, “Partai Politik dan Penurunan Ambang Batas Pencalonan dalam Pilkada (Studi Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu 2024 Provinsi Lampung)”, *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(3)
- Hasim Hartano, 2024, “Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024”, *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(4)
- Iza Rumesten RS, 2016, “Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, 13(1)
- Khairul Fahmi, 2010, “Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif,” *Jurnal Konstitusi*, 7 (3)
- Lia Nurhasanah, 2023, “Eksistensi Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Sultan*, 2(1)

- Maringan Panjaitan dan Simson Berkat Hulu, “Analisis Proses dan Faktor Penyebab Lahirnya Pasangan Calon Tunggal Versus Kotak Kosong pada Pilkada Serentak Tahun 2020” *Jisipol: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 1(2)
- Lili Romli, 2018, “Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal”, *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2)
- Lili Romli, 2017, “Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik pada Era Reformasi, *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Intenasional*, 8(2)
- Mohammad Syafei, 2016, “Tinjauan Atas Putusan Mahkamah Konstitusi No : 100/PUU-XIII/2015 Tentang Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah”, *Jurnal Legal Opinion*, 4(5)
- Muhammad Anwar Soleh, 2025, “Aktualisasi Prinsip Negara Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024”. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(2)
- Muhammad Anwar Soleh dan Durohim Amnan, 2024, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Demokratisasi Pemilihan Kepala Daerah”, *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 1(3)
- Muslih, *et.al.* 2021, “Peran Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratif”, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1)
- Muntoha, 2009, “Demokrasi dan Negara Hukum”, *Jurnal Hukum*, 3(16)
- Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati, 2019, “Calon Tunggal Pilkada Kurangi Kualitas Demokrasi: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015,” *Jurnal Yudisial*, 12(3)
- Mike Dewanti, *et.al.* 2022, “Kekalahan Petahana pada Pemilihan Umum 2019: Studi Kasus Calon Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa”, *Jurnal Politik Profetik*, 10(1)
- Nanik Prasetyoningsih, 2014, “Dampak Pemilihan Umum Serentak bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia”, *Jurnal Media Hukum*, 21(2)

- Nike K. Rumokoy, 2017, “Kedaulatan dan Kekuasaan dalam UUD 1945 dalam Pembentukan Hukum di Indonesia” *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(9)
- Nur Rohim Yunus, 2017 “Calon Tunggal Sebagai Wujud Disfungsi Partai Politik”, *Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, 1(4)
- _____, 2018, “Saat Kotak Kosong Memenangkan Pilkada”, *Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, 2(7)
- Pangi Syarwi Chaniago, 2016, “Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015” *Jurnal Indonesia Political Science Review*, 1(2)
- Rikki Hendrawan dan Muhammad Adhe Agasshi, 2024, “Penerapan Black Vote Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia: Solusi atau Anomali Bagi Demokrasi”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 10(2)
- Rofi Aulia Rahman, *et al.* 2022, “Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman bagi Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, 19(1)
- Sarbaini, 2020, “Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokrasi Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1)
- Silvi Aryana dan Irwan Triadi, 2024, “Analisis Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Pemilu 2024 Melalui Tinjauan Hukum Tata Negara” *Indonesian Journal of Law and Justice* 4(1)
- Siti Khodijah dan Valina Singka Subekti, 2020, “Dinamika Pembangunan Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018”, *Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2)
- Siti Nurhalimah, 2017, “Polemik Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal dalam Kerangka Demokrasi”, *Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 1(8)
- Syafruddin, 2022. “Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024”, *Journal of Government and Politics*, 4(2)

- Suha Qoriroh dan Anna Erliyana, 2022, “Polemik Pemilihan Kepala Daerah Dengan Satu Pasangan Calon Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XII/2015” *Pagaruyung Law Journal*, 5(2)
- Sutoni Fikri, 2024, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Hak Politik dalam Perspektif Teori Kontak Sosial”, *ASMR Law Journal*, 6(1)
- Wafia Silvi Dhesinta, 2016, “Calon Tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi”, *Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta*, 4(1)
- Zulkifli Sultan, *et.al.* 2023, “Peran Lembaga Pengawasan Pemilu: Data Pemilih Berkualitas Menuju Pemilu 2024”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 8(4)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

KARYA ILMIAH

- Armawan, Rumusan Demokrasi dan Negara Hukum Dalam Norma Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Pasca Perubahan, (*Tesis*, Universitas Islam Indonesia, 2016),
- Aspiyani, “Prinsip-Prinsip Demokrasi pada Pemilihan Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Jurusan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)

- Danang Enggartyasto, *Problematika Pelaksanaan Pilkada Serentak Saat Pandemi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 di Kabupaten Sleman*, (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2022)
- Junaidi, *Fenomena Calon Tunggal yang Didukung Mayoritas Partai Politik dan Implikasinya Terhadap Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. (Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 2023)
- M. Ardhi Razaq Abqa, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Terhadap Eksistensi Calon Tunggal dalam pemilihan kepala daerah Serentak 2017” (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2017)
- Rahma Khofidah Khoirun Umah, “Konsep Demokrasi Konstitusional Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Perspektif *Masalah Mursalah*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim, 2023)
- Soewoto Mulyosudarmo, “Kekuasaan dan Tanggung jawab Presiden Republik Indonesia (Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan)”, (Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga 1990)
- Syukur, “Rekrutmen Politik oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2014 di Kabupaten Merangin Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik” (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2015)
- Syafrina Husna Harahap, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Pilkada di Indonesia”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025)

WEBSITE

- Ady Thea DA, *Putusan MK Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Masuk RUU Pilkada*, Hukum Online <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-tentang-ambang-batas-pencalonan-kepala-daerah-masuk-ruu-pilkada-lt66c5b5e87294e/> pada tanggal 11 April 2025

Alinea. Id, *Pencalonan Petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, https://babel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2022/10/Tulisan-Hukum_Pencalonan-Petahana-Dalam-Pilkada.pdf pada tanggal 27 Maret 2025

_____, *Petahana Tidak Boleh Memanfaatkan Birokrasi untuk Pilkada*, <https://rumahpemilu.org/petahana-tidak-boleh-memanfaatkan-birokrasi-untuk-pilkada/> diakses pada tanggal 19 April 2025

_____, *Kecurangan Pilpres Berpotensi Terulang di Pilkada 2024*, <https://rumahpemilu.org/kecurangan-pilpres-berpotensi-terulang-di-pilkada-2024/> diakses pada tanggal 23 April 2025

Anggi Muliawati, *MK ubah Desain Surat Suara Calon Tunggal, Modelnya Setuju atau Tidak Setuju*, <https://news.detik.com/pilkada/d-7637809/mk-ubah-desain-surat-suara-calon-tunggal-modelnya-setuju-atau-tidak-setuju> diakses pada tanggal 21 april 2025

Annisa Nur Syafitri, *Literasi Politik Masyarakat dalam Pencegahan Politik Uang (Money Politics) di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, http://eprints.ipdn.ac.id/17441/1/REPOSITORY_31.0253_Annisa%20Nur%20Syafitri%20rev%203.pdf diakses pada tanggal 21 April 2025

Christian Huwae, *Peran Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Suatu Studi di kota Bitung)*, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/download/1449/1149> pada tanggal 27 Januari 2025, pukul 18.56

Danny Widodo Uji Prakoso, *Analisis Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik pada Fenomena Calon Tunggal Petahana Studi Kasus: Pilkada Kabupaten Pati 2017*. Diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/20054/18931> pada tanggal 25 maret 2025

- Detik News. Hasil Pemilu 2024. Diakses dari <https://news.detik.com/pemilu/d7253356/lengkap-hasil-pemilu-2024-pemenang-pilpres-hingga-daftar-parpol-ke-dpr> pada tanggal 27 Maret 2025
- Didik Sasono Setyadi, *Memaknai 'Suara Sah' dalam Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memaknai-suara-sah-dalam-putusan-mk-no-60-puu-xxii-2024-lt66ccb67bb1ab6/?page=3> pada tanggal 16 April 2025
- Dwi Sulisworo, *et.al. Demokrasi*, diakses dari <https://eprints.uad.ac.id/9437/1/DEMOKRASI%20dwi.pdf> pada tanggal 29 April 2025
- Dwin Andayani, *Perludem Ungkap Dampak Calon Tunggal: Pilkada Tak Kompetitif, Pemilih Apatis*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5121919/perludem-ungkap-dampak-calon-tunggal-pilkada-tak-kompetitif-pemilih-apatid> pada tanggal 17 Maret 2025, 23.00
- Gusti Grehenson, *Calon Tunggal di 38 Daerah, Kegagalan Partai Politik Calonkan Kadernya Sendiri* diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/calon-tunggal-di-38-daerah-kegagalan-partai-politik-calonkan-kadernya-sendiri/> pada tanggal 18 November 2024 pukul 21.08
- Gusti Grehenson, *Pakar UGM: Penghapusan Presidential Threshold jadi Langkah Maju Menuju Pemilu Demokratis*, <https://ugm.ac.id/id/berita/pakar-ugm-penghapusan-presidential-threshold-jadi-langkah-maju-menuju-pemilu-demokratis/> diakses pada tanggal 15 April 2025
- Grendy A.A. Saweho, *et.al, Calon Tunggal dan Pilkada*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/politico/article/view/42653> diakses pada tanggal 18 November 2024, pukul 14.22
- Haura Hamidah, *Daftar Pilkada 2024 yang Diikuti Paslon Tunggal dan yang Dimenangkan Kotak Kosong*, diakses dari <https://www.tempo.co/politik/daftar-pilkada-2024-yang-diikuti-paslon->

- [tunggal-dan-yang-dimenangkan-kotak-kosong-1180306](#) pada tanggal 17 Maret 2025
- Mahkamah Konstitusi RI, *Dikaji, Sanksi bagi Partai*, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11696> pada tanggal 8 Mei 2025
- Humas FH UI, *Calon Tunggal di Tengah Pragmatisme dan Hegemoni Elite Politik oleh Titi Anggraini, S.H., M.H.* diakses dari <https://law.ui.ac.id/calon-tunggal-di-tengah-pragmatisme-dan-hegemoni-elite-politik-olehtiti-anggraini-s-h-m-h/> pada tanggal 24 Januari 2025 pukul 08.34
- Humas, *Diskusi Pentingnya Proses Demokrasi dalam Internal Partai Politik, FH UGM Bersama Kemenkumham Gelar Stadium Generale*, <https://law.ugm.ac.id/diskusi-pentingnya-proses-demokrasi-dalam-internal-partai-politik-fh-ugm-bersama-kemenkumham-gelar-stadium-generale/> diakses pada tanggal 23 April 2025
- Junaidi, *Mengawal Konstitusionalitas Calon Tunggal*, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/10/07/mengawal-konstitusionalitas-calon-tunggal> pada tanggal 21 Januari 2025, pukul 11.56
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada tanggal 12 Februari 12, 2025 pukul 19.11
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://kbbi.web.id/kepala> pada tanggal 29 Januari 2025
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://kbbi.web.id/serentak> pada tanggal 29 Januari 2025
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/petahana> diakses pada tanggal 26 Maret 2025
- Mahkamah Konstitusi RI, *Desain Surat Suara Pilkada Calon Tunggal Berubah dan Berlaku 2029*, diakses <https://testing.mkri.id/berita/desain-surat-suara->

[pilkada-calon-tunggal-berubah-dan-berlaku-2029-21847](#) pada tanggal 10 april 2025

Mimi Kartika, *Kotak kosong Hanya Diterapkan Untuk Pilkada Calon Tunggal*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21848&menu=2> diakses pada tanggal 20 april 2025

Michelle Gabriela, *Antisipasi Fenomena Calon Tunggal dan Kotak Kosong dalam Pilkada 2024*, <https://www.tempo.co/politik/antisipasi-fenomena-calon-tunggal-dan-kotak-kosong-dalam-pilkada-2024-15841> diakses pada tanggal 20 April 2025

Nafisyul, *Calon Tunggal di Pilkada Digugat, Kotak Kosong Diusulkan*, diakses dari <http://news.liputan6.com/read/2297235/calon-tunggal-di-pilkada-digugat-kotak-kosong-diusulkan> . Pada tanggal 30 April 2025

Sekretariat Kabinet RI. *Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pilkada dengan 1 (satu) Pasangan calon*. diakses dari [https://setkab.go.id/putusan-mahkamah-konstitusi-terkait-pilkada-dengan-1-satu-pasangan-calon/#:~:text=Melalui%20keputusan%20MK%20Nomor%3A%20126,1%20\(satu\)%20tahun%20setelah%20penyelenggaraan](https://setkab.go.id/putusan-mahkamah-konstitusi-terkait-pilkada-dengan-1-satu-pasangan-calon/#:~:text=Melalui%20keputusan%20MK%20Nomor%3A%20126,1%20(satu)%20tahun%20setelah%20penyelenggaraan) pada tanggal 10 April 2025

Sri Dwi Aprilia, *Daftar 37 Paslon Tunggal yang akan Melawan Kotak Kosong di Pilkada Serentak 2024*, diakses dari <https://www.tempo.co/pemilu/daftar-37-paslon-tunggal-yang-akan-melawan-kotak-kosong-di-pilkada-serentak-2024-6125> pada tanggal 17 Maret 2025

Utami Argawati, *Mewujudkan Keadilan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024*, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18935>, pada tanggal 27 Januari 2025, pukul 10.09